

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera

5.1.1 Perkembangan Tingkat Inflasi di Pulau Sumatera

Inflasi adalah persentase kenaikan harga barang dan jasa dalam suatu periode, mencerminkan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi. Perubahannya dipengaruhi oleh harga komoditas, kondisi ekonomi global, dan kebijakan pemerintah. Meskipun inflasi di Indonesia bervariasi antarprovinsi, perbedaannya dipengaruhi oleh pola konsumsi, distribusi barang, dan aktivitas ekonomi lokal. Tingkat inflasi di Pulau Sumatera ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Perkembangan Inflasi di Provinsi Aceh

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	7,02
2006	-2,91
2007	3,76
2008	0,25
2009	-0,23
2010	4,64
2011	3,32
2012	0,06
2013	6,39
2014	7,83
2015	1,27
2016	3,13
2017	4,86
2018	1,93
2019	1,38
2020	3,46
2021	2,41
2022	6
2023	1,53
Rata-rata	2,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.1 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Aceh dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Inflasi tertinggi tercatat pada tahun 2014 sebesar 7,83%, sementara inflasi terendah terjadi pada tahun 2006 dengan angka -2,91%, yang menunjukkan kondisi deflasi. Provinsi Aceh juga mengalami deflasi pada tahun 2009 dengan tingkat inflasi -0,23%. Secara umum, periode 2005-2014 menunjukkan inflasi yang cenderung tidak stabil, dengan lonjakan signifikan pada tahun 2013 dan 2014, masing-masing sebesar 6,39% dan 7,83%.

Setelah 2014, inflasi mulai menunjukkan tren yang lebih stabil, meskipun ada beberapa penurunan signifikan seperti pada tahun 2015 (1,27%) dan 2019 (1,38%). Namun, pada tahun 2022, inflasi kembali meningkat hingga 6%, kemungkinan akibat faktor ekonomi global dan kebijakan domestik yang mempengaruhi harga barang dan jasa. Rata-rata inflasi di Provinsi Aceh selama periode ini adalah 2,95%, yang mencerminkan kondisi inflasi yang relatif moderat secara keseluruhan. Perubahan tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, stabilitas harga komoditas, serta dinamika pasar lokal dan nasional.

Tabel 5.2
Perkembangan Inflasi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	2,6
2006	0,47
2007	1,67
2008	1,36
2009	0,74
2010	7,65
2011	3,54
2012	3,79
2013	10,09
2014	8,24
2015	3,32
2016	6,6
2017	3,18
2018	1
2019	2,43
2020	1,76
2021	1,7
2022	6,1
2023	2,19
Rata-rata	3,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.2 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 10,09%, diikuti oleh tahun 2014 dengan inflasi 8,24%, serta tahun 2010 yang mencapai 7,65%. Sementara itu, tingkat inflasi terendah tercatat pada tahun 2006, yaitu 0,47%, yang menunjukkan kondisi inflasi yang sangat rendah. Tren inflasi di Sumatera Utara menunjukkan pola yang tidak stabil, terutama pada periode 2010-2016, di mana beberapa tahun mengalami lonjakan inflasi yang cukup tinggi.

Setelah tahun 2016, inflasi cenderung lebih terkendali, dengan beberapa tahun mencatat inflasi di bawah 2%, seperti pada tahun 2018

(1%), 2019 (2,43%), 2020 (1,76%), dan 2021 (1,7%). Namun, pada tahun 2022, inflasi kembali meningkat hingga 6,1%, kemungkinan akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan domestik yang mempengaruhi harga barang dan jasa. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Utara selama periode ini adalah 3,60%, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi di Provinsi Aceh (2,95%). Perubahan inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi nasional, stabilitas harga komoditas, serta dinamika pasar lokal yang berperan dalam pergerakan harga barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 5.3
Perkembangan Inflasi di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	2,37
2006	1,07
2007	1,53
2008	1,51
2009	-0,65
2010	7,84
2011	5,37
2012	4,16
2013	10,87
2014	11,9
2015	0,85
2016	5,02
2017	2,11
2018	2,55
2019	1,72
2020	2,12
2021	1,37
2022	7,38
2023	2,55
Rata-rata	3,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.3 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi

mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 11,9%, diikuti oleh tahun 2013 dengan inflasi 10,87%, dan tahun 2010 yang mencapai 7,84%. Sementara itu, tingkat inflasi terendah tercatat pada tahun 2009, yaitu -0,65%, yang menunjukkan adanya deflasi di daerah tersebut.

Secara umum, inflasi di Sumatera Barat mengalami lonjakan signifikan pada periode 2010-2014, dengan angka yang cukup tinggi sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2015 (0,85%). Setelah itu, inflasi cenderung lebih terkendali, dengan beberapa tahun mencatat inflasi di bawah 3%, seperti pada tahun 2017 (2,11%), 2018 (2,55%), 2019 (1,72%), 2020 (2,12%), dan 2021 (1,37%). Namun, pada tahun 2022, inflasi kembali meningkat hingga 7,38%, kemungkinan akibat tekanan ekonomi global dan kebijakan domestik yang mempengaruhi harga barang dan jasa. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Barat selama periode ini adalah 3,77%, yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi di Provinsi Aceh (2,95%) namun sedikit lebih rendah dari Sumatera Utara (3,60%). Perubahan inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, stabilitas harga komoditas, serta dinamika pasar lokal yang berperan dalam pergerakan harga barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 5.4
Perkembangan Inflasi di Provinsi Riau

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	1,52
2006	-0,11
2007	1,61
2008	1,32
2009	-0,1
2010	7
2011	5,09
2012	3,35
2013	8,83
2014	8,53
2015	2,71
2016	4,19
2017	4,07
2018	2,54
2019	2,56
2020	2,24
2021	1,55
2022	7,04
2023	2,5
Rata-rata	3,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.4 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Riau dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 8,83%, diikuti oleh tahun 2014 dengan inflasi 8,53%, serta tahun 2010 yang mencapai 7%. Sementara itu, tingkat inflasi terendah tercatat pada tahun 2006 (-0,11%) dan 2009 (-0,1%), yang menunjukkan adanya kondisi deflasi di wilayah tersebut. Secara umum, inflasi di Riau mengalami kenaikan yang cukup tajam pada periode 2010-2014, sebelum akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2015 (2,71%). Setelah itu, inflasi cenderung lebih terkendali, dengan beberapa tahun mencatat inflasi di bawah 3%, seperti pada tahun 2018 (2,54%), 2019 (2,56%), 2020 (2,24%), dan 2021 (1,55%). Namun, pada tahun 2022,

inflasi kembali meningkat hingga 7,04%, kemungkinan akibat tekanan ekonomi global serta faktor domestik yang memengaruhi harga barang dan jasa.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Riau selama periode ini adalah 3,50%, yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh (2,95%) tetapi lebih rendah dari Sumatera Barat (3,77%) dan Sumatera Utara (3,60%). Perubahan tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan ekonomi, harga komoditas utama, serta dinamika pasar lokal yang memengaruhi kestabilan harga barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 5.5
Perkembangan Inflasi di Provinsi Kep. Riau

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	1,64
2006	-0,75
2007	0,92
2008	1,12
2009	-0,12
2010	6,17
2011	3,32
2012	3,92
2013	10,09
2014	7,49
2015	2,46
2016	3,06
2017	3,37
2018	2,36
2019	2,4
2020	1,66
2021	0,86
2022	4,96
2023	2,14
Rata-rata	3,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.5 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi

mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 10,09%, diikuti oleh tahun 2014 dengan inflasi 7,49%, serta tahun 2010 yang mencapai 6,17%. Sebaliknya, tingkat inflasi terendah tercatat pada tahun 2006 (-0,75%) dan 2009 (-0,12%), yang menunjukkan adanya kondisi deflasi di wilayah tersebut. Secara umum, inflasi di Kepulauan Riau mengalami lonjakan cukup tinggi pada periode 2010-2014 sebelum akhirnya menurun pada tahun 2015 (2,46%) dan tetap relatif terkendali dalam kisaran 2-3% hingga tahun 2021. Tahun 2022 mencatat kenaikan inflasi hingga 4,96%, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor ekonomi global dan domestik yang memengaruhi harga barang dan jasa. Pada tahun 2023, inflasi kembali menurun menjadi 2,14%.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Riau selama periode ini adalah 3,00%, yang lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh (2,95%) tetapi lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara (3,60%), Sumatera Barat (3,77%), dan Riau (3,50%). Perubahan tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi nasional, stabilitas harga komoditas utama, serta dinamika pasar lokal yang berdampak pada pergerakan harga barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 5.6
Perkembangan Inflasi di Provinsi Jambi

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	2,49
2006	0,34
2007	1,84
2008	1,17
2009	-0,31
2010	10,52
2011	2,76
2012	4,22
2013	8,74
2014	8,72
2015	1,37
2016	4,54
2017	2,68
2018	3,02
2019	1,27
2020	3,09
2021	1,67
2022	1,13
2023	3,27
Rata-rata	3,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.6 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Jambi dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 10,52%, diikuti oleh tahun 2013 (8,74%) dan 2014 (8,72%). Sebaliknya, tingkat inflasi terendah tercatat pada tahun 2009 dengan -0,31%, yang menunjukkan adanya kondisi deflasi di wilayah tersebut. Secara umum, inflasi di Jambi mengalami lonjakan cukup tinggi pada periode 2010-2014 sebelum akhirnya mengalami penurunan drastis pada tahun 2015 (1,37%). Setelah itu, inflasi cenderung lebih stabil dalam kisaran 1-4%, dengan beberapa pengecualian seperti tahun 2016 (4,54%) dan tahun 2023 (3,27%).

Tahun 2022 mencatat tingkat inflasi terendah setelah 2009, yakni sebesar 1,13%, yang menandakan tekanan harga yang relatif rendah di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Jambi selama periode ini adalah 3,29%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan Provinsi Aceh (2,95%) dan Kepulauan Riau (3,00%) tetapi lebih rendah dibandingkan Sumatera Barat (3,77%) dan Sumatera Utara (3,60%). Fluktuasi inflasi di Jambi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan harga komoditas utama, kebijakan ekonomi, serta dinamika pasar lokal yang memengaruhi stabilitas harga barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 5.7
Perkembangan Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	2,21
2006	0,58
2007	1,61
2008	1,32
2009	0,03
2010	6,02
2011	3,78
2012	2,72
2013	7,04
2014	8,38
2015	3,05
2016	3,68
2017	2,85
2018	2,78
2019	2,06
2020	1,5
2021	1,82
2022	5,94
2023	3,22
Rata-rata	3,19

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.7 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi mengalami fluktuasi dengan tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 8,38%, diikuti oleh tahun 2013 (7,04%) dan 2010 (6,02%). Sebaliknya, tingkat inflasi terendah tercatat pada tahun 2009 sebesar 0,03%, yang menunjukkan stabilitas harga yang hampir tidak mengalami perubahan.

Secara umum, inflasi di Sumatera Selatan cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada periode 2010-2014 sebelum akhirnya menurun pada tahun 2015 (3,05%). Setelah itu, inflasi relatif stabil dalam kisaran 1,5% hingga 3,78%, dengan pengecualian tahun 2022 yang mengalami kenaikan menjadi 5,94%. Pada tahun 2023, inflasi kembali menurun ke angka 3,22%.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Sumatera Selatan selama periode ini adalah 3,19%, yang lebih tinggi dibandingkan Aceh (2,95%) dan Kepulauan Riau (3,00%) tetapi lebih rendah dibandingkan Sumatera Utara (3,60%), Sumatera Barat (3,77%), dan Jambi (3,29%). Perubahan tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk harga komoditas utama, kebijakan ekonomi, serta dinamika pasar lokal yang memengaruhi pergerakan harga barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 5.8
Perkembangan Inflasi di Provinsi Bengkulu

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	3,62
2006	-0,5
2007	1,04
2008	2,63
2009	-0,23
2010	9,08
2011	3,96
2012	4,61
2013	9,94
2014	10,85
2015	3,25
2016	5
2017	3,56
2018	2,35
2019	2,91
2020	0,89
2021	2,42
2022	5,92
2023	3,09
Rata-rata	3,92

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.8 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi mengalami fluktuasi yang cukup besar, dengan tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 10,85%, diikuti oleh tahun 2013 (9,94%) dan 2010 (9,08%). Sebaliknya, inflasi terendah tercatat pada tahun 2006 (-0,5%) dan 2009 (-0,23%), yang menunjukkan adanya deflasi atau penurunan harga barang dan jasa secara umum.

Secara umum, inflasi di Bengkulu menunjukkan tren naik yang signifikan pada periode 2010-2014, di mana angka inflasi tetap berada di atas 9%. Setelah tahun 2015, inflasi lebih stabil dengan kisaran 0,89% hingga 5,92%, dengan kenaikan cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 5,92%. Pada tahun 2023, inflasi kembali turun menjadi 3,09%.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Bengkulu selama periode ini adalah 3,92%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi di Sumatera lainnya, seperti Riau (3,50%), Jambi (3,29%), dan Sumatera Selatan (3,19%). Fluktuasi inflasi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga komoditas, kebijakan ekonomi, serta perubahan permintaan dan penawaran barang dan jasa di wilayah tersebut.

Tabel 5.9
Perkembangan Inflasi di Provinsi Lampung

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	1,58
2006	0,01
2007	0,7
2008	2,2
2009	-0,25
2010	9,95
2011	4,24
2012	4,3
2013	7,56
2014	8,36
2015	4,65
2016	2,75
2017	3,14
2018	2,92
2019	3,53
2020	1,93
2021	2,13
2022	5,52
2023	3,52
Rata-rata	3,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.9 menunjukkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Lampung dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi di Lampung mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan tingkat tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 9,95%, diikuti oleh tahun 2014 (8,36%) dan 2013 (7,56%). Sebaliknya, inflasi terendah tercatat pada tahun

2009 dengan angka -0,25%, yang menunjukkan adanya deflasi atau penurunan harga secara umum.

Secara umum, inflasi di Lampung mengalami lonjakan tajam pada tahun 2010, sebelum kembali ke tren yang lebih stabil. Pada tahun 2013 dan 2014, inflasi kembali meningkat di atas 7%, namun setelah tahun 2015, angka inflasi cenderung lebih terkendali, dengan kisaran antara 1,93% hingga 5,52%. Tahun 2022 mencatat lonjakan inflasi sebesar 5,52%, tetapi pada tahun 2023, inflasi kembali turun menjadi 3,52%. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat inflasi di Provinsi Lampung selama periode ini adalah 3,62%, yang sedikit lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Sumatera, seperti Kepulauan Riau (3,00%) dan Jambi (3,29%), tetapi lebih rendah dibandingkan Bengkulu (3,92%).

Tabel 5.10
Perkembangan Inflasi di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tahun	Tingkat Inflasi
2005	4,3
2006	0,31
2007	0,03
2008	1,01
2009	0,94
2010	9,36
2011	5
2012	6,57
2013	8,71
2014	6,81
2015	4,66
2016	7,78
2017	2,66
2018	3,45
2019	2,31
2020	0,52
2021	3,6
2022	6,07
2023	2,01
Rata-rata	4,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.10 menggambarkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 hingga 2023. Selama periode ini, inflasi di provinsi tersebut menunjukkan fluktuasi yang cukup besar, dengan tingkat inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 9,36%, diikuti oleh tahun 2013 (8,71%) dan 2016 (7,78%). Sebaliknya, tingkat inflasi terendah tercatat pada tahun 2007, yaitu hanya 0,03%, menunjukkan kondisi harga yang sangat stabil pada tahun tersebut.

Secara umum, inflasi di Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami lonjakan pada beberapa tahun tertentu, terutama di tahun 2010, 2013, dan 2016. Namun, setelah itu, tingkat inflasi menjadi lebih terkendali dengan kisaran antara 0,52% hingga 6,07% dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, inflasi mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir dengan hanya 0,52%, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Tabel 5.11
Rata-rata Tingkat Inflasi di Pulau Sumatera Periode 2005-2023

Provinsi	Rata-rata Tingkat Inflasi
Aceh	2,95
Sumatera Utara	3,60
Sumatera Barat	3,77
Riau	3,50
Kepulauan Riau	3,00
Jambi	3,29
Sumatera Selatan	3,19
Bengkulu	3,92
Lampung	3,62
Bangka Belitung	4,01

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023 (Diolah)

Secara keseluruhan, rata-rata inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode ini adalah 4,01%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa provinsi lain di Sumatera, seperti Jambi (3,29%) dan Sumatera Selatan (3,19%), tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan Bengkulu (3,92%). Perubahan inflasi di daerah ini

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga komoditas, kebijakan ekonomi daerah, dan dinamika perdagangan lokal.

Dapat disimpulkan bahwa data inflasi di provinsi-provinsi Sumatera tahun 2005–2023, Provinsi Jambi mencatat inflasi tertinggi pada 2010 sebesar 10,52%. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata inflasi tertinggi, yaitu 4,01%, menunjukkan kenaikan harga yang lebih tinggi dibanding provinsi lain. Sebaliknya, Provinsi Kepulauan Riau memiliki rata-rata inflasi terendah, yakni 3,00%, mencerminkan stabilitas harga yang lebih baik.

5.1.2 Perkembangan Nilai Tukar di Indonesia

Nilai tukar adalah rasio yang menunjukkan seberapa banyak satu mata uang dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain, dan menjadi salah satu indikator kunci dalam ekonomi. Pergerakan nilai tukar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inflasi, suku bunga, neraca perdagangan, arus investasi asing, serta stabilitas politik dan ekonomi. Ketika nilai tukar suatu mata uang menguat, barang dan jasa dari negara tersebut menjadi lebih murah bagi negara lain, sedangkan ketika nilai tukar melemah, biaya barang dan jasa menjadi lebih mahal. Oleh karena itu, fluktuasi nilai tukar dapat berdampak signifikan pada daya saing produk domestik dan keseimbangan perdagangan.

Di Pulau Sumatera, nilai tukar memiliki implikasi yang penting bagi kegiatan ekonomi, terutama bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, seperti industri manufaktur dan pertanian. Ketidakstabilan nilai tukar dapat menyebabkan biaya produksi meningkat, yang kemudian berdampak pada harga jual produk dan daya beli masyarakat. Misalnya, jika nilai tukar rupiah melemah, biaya impor barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi akan meningkat, yang bisa berujung pada inflasi dan pengurangan daya beli konsumen.

Selain itu, pergerakan nilai tukar juga memengaruhi investasi asing. Investor cenderung mempertimbangkan stabilitas nilai tukar sebelum memutuskan untuk menanamkan modal di suatu daerah. Oleh karena itu,

perubahan nilai tukar dapat memengaruhi tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Tabel di bawah ini menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di Provinsi dari Pulau Sumatera, yang dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai fluktuasi nilai tukar dan dampaknya terhadap ekonomi lokal:

Tabel 5.12
Perkembangan Nilai Tukar di Pulau Sumatera

TAHUN	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	KEPRI	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	KEP. BABEL
2005	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830	9.830
2006	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
2007	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419	9.419
2008	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
2009	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
2010	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991	8.991
2011	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068	9.068
2012	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670	9.670
2013	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189	12.189
2014	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440
2015	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440	12.440
2016	13.795	13.795	13.795	13.795	13.795	13.795	13.795	13.795	13.795	13.795
2017	13.548	13.548	13.548	13.548	13.548	13.548	13.548	13.548	13.548	13.548
2018	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481	14.481
2019	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901	13.901
2020	14.105	14.105	14.105	14.105	14.105	14.105	14.105	14.105	14.105	14.105
2021	14.269	14.269	14.269	14.269	14.269	14.269	14.269	14.269	14.269	14.269
2022	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731	15.731
2023	15.416	15.416	15.416	15.416	15.416	15.416	15.416	15.416	15.416	15.416
Rata-rata	12.035	12.035	12.035							

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.12 menunjukkan perkembangan nilai tukar di seluruh provinsi di Pulau Sumatera dari tahun 2005 hingga 2023. Nilai tukar dalam tabel ini tampak seragam di setiap provinsi pada tahun yang sama, menunjukkan bahwa perubahan nilai tukar bersifat nasional atau regional tanpa perbedaan antarprovinsi.

Pada tahun 2005, nilai tukar berada di angka 9.830, kemudian mengalami fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2010 sebesar 8.991. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2013 dan 2014, mencapai 12.189 dan 12.440. Tren kenaikan terus berlanjut hingga tahun 2016, di mana nilai tukar mencapai 13.795, dan terus meningkat hingga puncaknya pada tahun 2022 dengan nilai 15.731. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 15.416. Secara keseluruhan, rata-rata nilai tukar dalam periode 2005-2023 adalah 12.035 untuk semua provinsi di Pulau Sumatera. Tahun 2022 menjadi tahun dengan nilai tukar tertinggi, sedangkan 2010 mencatat nilai tukar terendah, yaitu 8.991.

Pada tahun 2013 dan 2014, kita melihat adanya kenaikan yang signifikan dalam nilai tukar. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan apresiasi mata uang Indonesia terhadap mata uang lainnya, yang mungkin dipengaruhi oleh peningkatan daya tarik investasi atau kebijakan moneter yang lebih stabil. Apresiasi ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia atau daerah-daerah di Pulau Sumatera mengalami penguatan, yang berimbas pada daya beli yang lebih baik dan kemampuan untuk bertransaksi dengan luar negeri lebih menguntungkan.

Kenaikan dan penurunan nilai tukar salah satunya dipengaruhi oleh kurs, kurs memegang peranan dalam hubungan perdagangan internasional, karena kurs dapat membandingkan harga dari setiap barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai tukar mata uang atau kurs antara dua mata uang adalah sama dengan jumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli satu dolar atau dengan kata lain merupakan nilai rupiah dalam mata uang dolar (Levi, 2001). Jika suatu mata uang

menguat terhadap mata uang lain, maka mata uang tersebut mengalami apresiasi, dan jika mata uang melemah, maka terjadi depresiasi.

Penurunan nilai tukar pada tahun 2010 bisa mengindikasikan adanya depresiasi, di mana mata uang Indonesia melemah dibandingkan dengan mata uang asing. Depresiasi ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti inflasi yang lebih tinggi, ketidakstabilan ekonomi, atau kebijakan moneter yang tidak mendukung. Depresiasi ini mengarah pada meningkatnya biaya impor dan melemahnya daya beli masyarakat, namun dapat meningkatkan daya saing ekspor karena harga barang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional.

5.1.3 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang mengukur kualitas hidup suatu wilayah melalui tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. IPM memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perkembangan suatu daerah dibandingkan dengan hanya mengandalkan ukuran ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita.

Di Indonesia, IPM menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, tetapi terdapat kesenjangan yang mencolok antar daerah, termasuk di Pulau Sumatera. Provinsi-provinsi seperti Sumatera Utara dan Riau biasanya memiliki IPM yang lebih tinggi, berkat akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Sebaliknya, beberapa provinsi di Sumatera, termasuk Jambi, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Peningkatan IPM di Provinsi Jambi penting untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian lebih, sehingga kebijakan dapat diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Tabel 5.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh

Tahun	IPM
2005	69,05
2006	69,41
2007	70,35
2008	70,76
2009	71,31
2010	67,09
2011	67,45
2012	67,81
2013	68,3
2014	68,81
2015	69,45
2016	70
2017	70,6
2018	71,19
2019	71,9
2020	71,99
2021	72,18
2022	72,8
2023	73,48
Rata-rata	70,21

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.13 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh dari tahun 2005 hingga 2023. Secara umum, IPM mengalami tren peningkatan dari 69,05 pada tahun 2005 menjadi 73,48 pada tahun 2023, dengan rata-rata 70,21 selama periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2010, di mana IPM turun menjadi 67,09 setelah sebelumnya mencapai 71,31 pada tahun 2009. Namun, setelah itu, IPM kembali mengalami peningkatan secara bertahap setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2023, mencatat angka 73,48, yang juga menjadi nilai tertinggi dalam periode ini.

Tabel 5.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	IPM
2005	72,03
2006	72,46
2007	72,78
2008	73,29
2009	73,8
2010	67,09
2011	67,34
2012	67,74
2013	68,36
2014	68,87
2015	69,51
2016	70
2017	70,57
2018	71,18
2019	71,74
2020	71,77
2021	72
2022	72,71
2023	73,37
Rata-rata	70,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.14 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2005 hingga 2023. Secara umum, IPM mengalami peningkatan dari 72,03 pada tahun 2005 menjadi 73,37 pada tahun 2023, dengan rata-rata 70,87 selama periode ini. Penurunan terbesar terjadi pada 2010, di mana IPM turun drastis menjadi 67,09 setelah sebelumnya mencapai 73,8 pada 2009. Namun, setelah itu, IPM kembali meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Nilai tertinggi tercatat pada 2023, yaitu 73,37, yang menunjukkan tren positif dalam pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Tabel 5.15
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	IPM
2005	71,19
2006	71,65
2007	72,23
2008	72,96
2009	73,44
2010	67,25
2011	67,81
2012	68,36
2013	68,91
2014	69,36
2015	69,98
2016	70,73
2017	71,24
2018	71,73
2019	72,39
2020	72,38
2021	72,65
2022	73,26
2023	75,64
Rata-rata	71,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.15 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2005 hingga 2023. Secara keseluruhan, IPM mengalami tren peningkatan dari 71,19 pada tahun 2005 menjadi 75,64 pada tahun 2023, dengan rata-rata 71,22 selama periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada 2010, di mana IPM turun menjadi 67,25 setelah sebelumnya mencapai 73,44 pada 2009. Namun, setelah itu, IPM kembali meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Nilai tertinggi tercatat pada 2023, yaitu 75,64, yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam pembangunan manusia di Sumatera Barat.

Tabel 5.16
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Riau

Tahun	IPM
2005	73,63
2006	73,81
2007	74,63
2008	75,09
2009	75,6
2010	68,65
2011	68,9
2012	69,15
2013	69,91
2014	70,33
2015	70,84
2016	71,2
2017	71,79
2018	72,44
2019	73
2020	72,71
2021	72,94
2022	73,52
2023	74,04
Rata-rata	72,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.16 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau dari tahun 2005 hingga 2023. Secara umum, IPM mengalami tren peningkatan dari 73,63 pada tahun 2005 menjadi 74,04 pada tahun 2023, dengan rata-rata 72,22 selama periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada 2010, di mana IPM turun menjadi 68,65 setelah sebelumnya mencapai 75,6 pada 2009. Setelah itu, IPM kembali meningkat secara bertahap. Nilai tertinggi tercatat pada 2009, yaitu 75,6, sebelum mengalami penurunan di tahun berikutnya. Namun, dalam jangka panjang, Provinsi Riau terus menunjukkan perbaikan dalam pembangunan manusia.

Tabel 5.17
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kep. Riau

Tahun	IPM
2005	72,23
2006	72,79
2007	73,68
2008	74,18
2009	74,54
2010	71,13
2011	71,61
2012	72,36
2013	73,02
2014	73,4
2015	73,75
2016	73,99
2017	74,45
2018	74,84
2019	75,48
2020	75,59
2021	75,79
2022	76,46
2023	77,11
Rata-rata	74,02

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.17 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2005 hingga 2023. Secara keseluruhan, IPM mengalami peningkatan dari 72,23 pada tahun 2005 menjadi 77,11 pada tahun 2023, dengan rata-rata 74,02 selama periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada 2010, di mana IPM turun menjadi 71,13 setelah sebelumnya mencapai 74,54 pada 2009. Namun, setelah itu, IPM terus mengalami kenaikan secara konsisten. Nilai tertinggi tercatat pada 2023, yaitu 77,11, menunjukkan peningkatan pembangunan manusia di wilayah ini dalam jangka panjang.

Tabel 5.18
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jambi

Tahun	IPM
2005	70,95
2006	71,29
2007	71,46
2008	71,99
2009	72,45
2010	65,39
2011	66,14
2012	66,94
2013	67,76
2014	68,24
2015	68,89
2016	69,62
2017	69,99
2018	70,65
2019	71,26
2020	71,29
2021	71,63
2022	72,14
2023	72,77
Rata-rata	70,04

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.18 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jambi dari tahun 2005 hingga 2023. Secara keseluruhan, IPM mengalami peningkatan dari 70,95 pada tahun 2005 menjadi 72,77 pada tahun 2023, dengan rata-rata 70,04 selama periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada 2010, di mana IPM turun drastis menjadi 65,39 setelah sebelumnya mencapai 72,45 pada 2009. Namun, setelah tahun 2010, IPM kembali mengalami tren peningkatan secara bertahap. Nilai tertinggi tercatat pada 2023, yaitu 72,77, menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pembangunan manusia di Provinsi Jambi sepanjang periode ini.

Tabel 5.19
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	IPM
2005	70,23
2006	71,09
2007	71,4
2008	72,05
2009	72,61
2010	64,44
2011	65,12
2012	65,79
2013	66,16
2014	66,75
2015	67,46
2016	68,24
2017	68,86
2018	69,39
2019	70,02
2020	70,01
2021	70,24
2022	70,9
2023	71,62
Rata-rata	69,07

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.19 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005 hingga 2023. Secara umum, IPM di provinsi ini mengalami peningkatan dari 70,23 pada tahun 2005 menjadi 71,62 pada tahun 2023, dengan rata-rata 69,07 selama periode tersebut. Penurunan tajam terjadi pada 2010, di mana IPM turun menjadi 64,44 setelah sebelumnya mencapai 72,61 pada tahun 2009. Namun, setelah 2010, IPM kembali mengalami peningkatan bertahap setiap tahunnya. Peningkatan yang stabil menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek pembangunan manusia di Sumatera Selatan, dengan nilai tertinggi tercatat pada 2023 sebesar 71,62.

Tabel 5.20
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu

Tahun	IPM
2005	71,09
2006	71,28
2007	71,57
2008	72,14
2009	72,55
2010	65,35
2011	65,96
2012	66,61
2013	67,5
2014	68,06
2015	68,59
2016	69,33
2017	69,95
2018	70,64
2019	71,21
2020	71,4
2021	71,64
2022	72,16
2023	72,78
Rata-rata	69,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.20 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bengkulu dari tahun 2005 hingga 2023. Secara keseluruhan, IPM di provinsi ini mengalami peningkatan dari 71,09 pada tahun 2005 menjadi 72,78 pada tahun 2023, dengan rata-rata 69,99 selama periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada 2010, di mana IPM turun drastis menjadi 65,35 setelah sebelumnya mencapai 72,55 pada tahun 2009. Namun, setelah 2010, IPM kembali meningkat secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan adanya perbaikan dalam berbagai aspek pembangunan manusia di Bengkulu. Nilai tertinggi tercatat pada 2023 dengan 72,78, mencerminkan kemajuan positif dalam kualitas hidup masyarakat di provinsi ini.

Tabel 5.21
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Lampung

Tahun	IPM
2005	68,85
2006	69,38
2007	69,78
2008	70,3
2009	70,93
2010	63,71
2011	64,2
2012	64,87
2013	65,73
2014	66,42
2015	66,95
2016	67,65
2017	68,25
2018	69,02
2019	69,57
2020	69,69
2021	69,9
2022	70,45
2023	72,48
Rata-rata	68,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.21 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Lampung dari tahun 2005 hingga 2023. Secara umum, IPM di provinsi ini mengalami tren peningkatan dari 68,85 pada tahun 2005 menjadi 72,48 pada tahun 2023, dengan rata-rata 68,32 selama periode tersebut. Penurunan tajam terjadi pada 2010, di mana IPM turun drastis ke 63,71 dari 70,93 pada tahun 2009. Namun, setelah itu, IPM kembali meningkat secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat di Lampung. Peningkatan yang signifikan terjadi pada 2023, di mana IPM mencapai 72,48, angka tertinggi selama periode pengamatan, mencerminkan perkembangan yang positif dalam pembangunan manusia di provinsi ini.

Tabel 5.22
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kep. Bangka Belitung

Tahun	IPM
2005	70,68
2006	71,18
2007	71,62
2008	72,19
2009	72,55
2010	66,02
2011	66,59
2012	67,21
2013	67,92
2014	68,27
2015	69,05
2016	69,55
2017	69,99
2018	70,67
2019	71,3
2020	71,47
2021	71,69
2022	72,24
2023	74,09
Rata-rata	70,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.22 menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 hingga 2023. Secara umum, IPM di provinsi ini mengalami tren peningkatan dari 70,68 pada tahun 2005 menjadi 74,09 pada tahun 2023, dengan rata-rata 70,23 selama periode tersebut. Penurunan signifikan terjadi pada 2010, di mana IPM turun drastis ke 66,02 dari 72,55 pada tahun 2009. Namun, setelah itu, IPM kembali meningkat secara bertahap setiap tahunnya. Peningkatan yang cukup signifikan terlihat pada 2023, di mana IPM mencapai 74,09, angka tertinggi dalam periode pengamatan. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan, maupun standar ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 5.23
Rata-rata Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Sumatera Periode 2005-2023

Provinsi	Rata-rata IPM
Aceh	70,21
Sumatera Utara	70,87
Sumatera Barat	71,22
Riau	72,22
Kepulauan Riau	74,02
Jambi	70,04
Sumatera Selatan	69,07
Bengkulu	69,99
Lampung	68,32
Bangka Belitung	70,23

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari beberapa provinsi di pulau Sumatera terlihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau mencatat IPM tertinggi pada tahun 2023 dengan nilai 77,11. Secara umum, setiap provinsi mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami penurunan signifikan pada tahun 2010. Di antara semua provinsi yang dianalisis, rata-rata IPM tertinggi selama periode tersebut juga dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau, dengan nilai rata-rata sebesar 74,02. Sementara itu, Provinsi Sumatera Barat mencatat kenaikan IPM tertinggi pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mencapai angka 75,64. Penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2010 tampak terjadi di sebagian besar provinsi, termasuk di Provinsi Jambi yang mengalami penurunan drastis dari 72,45 pada tahun 2009 menjadi 65,39 pada tahun 2010. Meskipun demikian, tren jangka panjang menunjukkan bahwa setiap provinsi terus mengalami perbaikan dalam pembangunan manusia, sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai IPM hingga tahun 2023.

5.1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu wilayah untuk menghasilkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu, yang seringkali diukur melalui perubahan Produk Domestik Bruto (PDB). Di

Indonesia, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi, konsumsi, ekspor-impor, serta kebijakan pemerintah. Perkembangan ekonomi yang positif menunjukkan adanya peningkatan aktivitas bisnis, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Di Pulau Sumatera, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sektor-sektor utama seperti perkebunan, pertanian, dan pertambangan. Provinsi-provinsi di Sumatera menunjukkan variasi dalam tingkat pertumbuhan ekonomi mereka, tergantung pada potensi sumber daya alam dan infrastruktur.. Data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 5.4:

Tabel 5.24
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	1,22
2006	7,7
2007	7,23
2008	1,88
2009	3,92
2010	5,91
2011	4,38
2012	4,95
2013	4,15
2014	4,02
2015	4,27
2016	4,31
2017	4,13
2018	4,49
2019	4,18
2020	-0,74
2021	3,61
2022	3,8
2023	4,91
Rata-rata	4,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.24 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,12%. Data ini mencerminkan fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang periode tersebut. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 7,7%, sementara tahun 2020 mencatatkan kontraksi sebesar -0,74% akibat dampak pandemi COVID-19. Setelah mengalami penurunan pada tahun tersebut, perekonomian Aceh mulai menunjukkan pemulihan dengan pertumbuhan 3,61% pada 2021 dan meningkat menjadi 4,91% pada 2023. Meskipun mengalami perlambatan di beberapa tahun, secara keseluruhan tren pertumbuhan ekonomi Aceh tetap positif, terutama setelah melewati dampak pandemi.

Tabel 5.25
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	5,52
2006	6,26
2007	6,89
2008	6,4
2009	5,14
2010	6,42
2011	6,63
2012	6,45
2013	6,07
2014	5,23
2015	5,1
2016	5,18
2017	5,12
2018	5,18
2019	5,22
2020	-1,07
2021	2,61
2022	4,73
2023	5,01
Rata-rata	5,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.25 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,16%. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di provinsi ini cukup stabil, dengan puncaknya terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,89%. Namun, pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -1,07% akibat pandemi COVID-19. Setelah itu, perekonomian mulai pulih dengan pertumbuhan 2,61% pada 2021 dan meningkat menjadi 5,01% pada 2023. Meskipun mengalami beberapa fluktuasi, Sumatera Utara menunjukkan tren pemulihan yang kuat pasca pandemi, mendekati tingkat pertumbuhan sebelum tahun 2020.

Tabel 5.26
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Barat

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	5,73
2006	6,14
2007	6,34
2008	6,37
2009	4,16
2010	5,6
2011	6,34
2012	6,31
2013	6,08
2014	4,53
2015	4,23
2016	4
2017	4,07
2018	3,96
2019	5,05
2020	-2,24
2021	4,38
2022	4,54
2023	4,3
Rata-rata	4,73

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.26 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,73%. Pada periode 2005-2013, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan stabil, dengan puncaknya sebesar 6,37% pada tahun 2008. Namun, setelah 2014, pertumbuhan cenderung melambat, mencapai titik terendah pada 2020 dengan kontraksi sebesar -2,24% akibat pandemi COVID-19. Pasca pandemi, ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 4,38% pada 2021 dan stabil di sekitar 4,3% hingga 2023. Meskipun pemulihan terjadi, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih belum kembali ke tingkat sebelum 2014.

Tabel 5.27
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	8,54
2006	8,66
2007	8,25
2008	8,06
2009	6,44
2010	4,94
2011	5,57
2012	3,76
2013	2,48
2014	2,71
2015	0,22
2016	2,23
2017	4,54
2018	3,94
2019	4,87
2020	-0,21
2021	4,56
2022	5
2023	4,55
Rata-rata	4,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.27 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,69%. Pada awal periode, pertumbuhan ekonomi Riau mencapai angka tertinggi, dengan puncaknya sebesar 8,66% pada 2006. Namun, sejak 2010 terjadi tren penurunan signifikan, dengan pertumbuhan hanya 0,22% pada 2015. Tahun 2020, ekonomi mengalami kontraksi sebesar -0,21% akibat pandemi COVID-19. Pemulihan terjadi setelahnya, dengan pertumbuhan mencapai 5% pada 2022, meskipun pada 2023 sedikit melambat ke 4,55%. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Riau mengalami fluktuasi dengan kecenderungan melemah dibandingkan awal periode.

Tabel 5.28
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kep. Riau

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	7,08
2006	7,23
2007	7,55
2008	7,22
2009	3,65
2010	6,71
2011	6,96
2012	7,63
2013	7,21
2014	6,6
2015	6,02
2016	4,98
2017	1,98
2018	4,47
2019	4,83
2020	-3,8
2021	3,43
2022	5,09
2023	5,2
Rata-rata	5,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.28 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,27%. Pada awal periode, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, mencapai 7,63% pada 2012. Namun, setelah 2015 terjadi tren penurunan yang signifikan, dengan pertumbuhan hanya 1,98% pada 2017. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -3,8% pada 2020. Pemulihan terjadi setelahnya, dengan pertumbuhan mencapai 5,2% pada 2023. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau mengalami fluktuasi, dengan tren menurun setelah 2015, meskipun ada tanda-tanda pemulihan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 5.29
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	6,25
2006	8,35
2007	6,58
2008	7,37
2009	6,9
2010	7,35
2011	7,86
2012	7,03
2013	6,84
2014	7,36
2015	4,21
2016	4,37
2017	4,6
2018	4,69
2019	4,35
2020	-0,51
2021	3,7
2022	5,12
2023	4,66
Rata-rata	5,64

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.29 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,64%. Pada periode 2005–2014, pertumbuhan ekonomi Jambi relatif tinggi, mencapai puncaknya pada 2011 sebesar 7,86%. Namun, sejak 2015, terjadi perlambatan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan turun hingga 4,21% pada tahun tersebut. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -0,51% pada 2020, tetapi pemulihan terjadi dalam beberapa tahun berikutnya, dengan pertumbuhan mencapai 5,12% pada 2022.

Tabel 5.30
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	6,91
2006	7,31
2007	8,04
2008	6,31
2009	5,05
2010	5,63
2011	6,5
2012	6
2013	5,47
2014	4,68
2015	4,42
2016	5,03
2017	5,51
2018	6,04
2019	5,71
2020	0,11
2021	3,58
2022	5,23
2023	5,08
Rata-rata	5,40

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.30 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 5,40%. Pada periode 2005–2007, pertumbuhan ekonomi cukup tinggi, mencapai puncaknya pada 2007 dengan 8,04%. Namun, sejak 2008 terjadi perlambatan, terutama pada 2009 saat pertumbuhan turun menjadi 5,05%. Setelah itu, pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5-6% hingga 2019. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan turun drastis menjadi 0,11% pada 2020, namun kembali meningkat dalam beberapa tahun berikutnya, mencapai 5,23% pada 2022. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dengan tren penurunan setelah 2007, tetapi menunjukkan pemulihan pasca-pandemi.

Tabel 5.31
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	5,82
2006	5,95
2007	6,03
2008	4,93
2009	4,04
2010	10,52
2011	12,67
2012	11,59
2013	11,32
2014	10,66
2015	10,29
2016	9,06
2017	8,7
2018	7,79
2019	0,76
2020	3,06
2021	5,31
2022	7,11
2023	6,1
Rata-rata	7,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.31 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bengkulu dari tahun 2005 hingga 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,46%. Pada awal periode, pertumbuhan ekonomi relatif stabil di kisaran 5-6%, namun mengalami lonjakan signifikan pada 2010 hingga mencapai 10,52%. Tren pertumbuhan tinggi berlanjut hingga 2016, dengan puncaknya pada 2011 sebesar 12,67%. Setelah itu, terjadi perlambatan bertahap, dan pada 2019 pertumbuhan turun drastis menjadi 0,76%. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan pertumbuhan sedikit meningkat ke 3,06% pada 2020, kemudian terus membaik dalam beberapa tahun berikutnya hingga mencapai 7,11% pada 2022.

Tabel 5.32
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	4,61
2006	5,31
2007	6,14
2008	5,33
2009	5,33
2010	5,81
2011	6,56
2012	6,44
2013	5,77
2014	5,08
2015	5,13
2016	5,14
2017	5,16
2018	5,23
2019	5,26
2020	-1,66
2021	2,77
2022	4,28
2023	4,55
Rata-rata	4,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.32 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung dari tahun 2005 hingga 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,85%. Pertumbuhan ekonomi Lampung mengalami tren positif dari 2005 hingga 2013, mencapai puncaknya pada 2011 sebesar 6,56%. Setelah itu, terjadi sedikit penurunan dan stabilisasi di kisaran 5% hingga 2019. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi pada 2020 dengan pertumbuhan negatif sebesar -1,66%. Namun, ekonomi mulai pulih pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan mencapai 4,55% pada 2023. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi, ekonomi Lampung menunjukkan ketahanan dan pemulihan yang cukup baik pasca-pandemi.

Tabel 5.33
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provins Kep. Bangka Belitung

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2005	4,6
2006	4,8
2007	5,37
2008	4,86
2009	3,77
2010	3,14
2011	6,9
2012	5,5
2013	5,2
2014	4,67
2015	4,08
2016	4,1
2017	4,47
2018	4,45
2019	3,32
2020	-2,29
2021	5,05
2022	4,4
2023	4,38
Rata-rata	4,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Tabel 5.33 menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2005 hingga 2023 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,25%. Pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi, dengan periode tertinggi terjadi pada 2011 sebesar 6,9%. Setelah itu, terjadi perlambatan dengan pertumbuhan berkisar antara 3% hingga 5% pada tahun-tahun berikutnya. Dampak pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -2,29%. Namun, ekonomi mulai pulih pada 2021 dengan pertumbuhan 5,05% dan tetap stabil hingga 2023 di angka 4,38%. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan ekonomi, Bangka Belitung menunjukkan pemulihan yang cukup baik pasca-pandemi. Jadi dapat disimpulkan bahwa provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam satu tahun terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2006, dengan angka mencapai 8,66%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2020, dengan kontraksi sebesar -3,8% akibat dampak pandemi COVID-19.

Tabel 5.34

Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Sumatera Periode 2005-2023

Provinsi	Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi
Aceh	4,12
Sumatera Utara	5,16
Sumatera Barat	4,73
Riau	4,69
Kepulauan Riau	5,27
Jambi	5,64
Sumatera Selatan	5,40
Bengkulu	7,46
Lampung	4,85
Bangka Belitung	4,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2023

Jika melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi selama periode tersebut, Provinsi Jambi memiliki rata-rata pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 5,64%. Provinsi ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup stabil pada awal periode, meskipun mengalami perlambatan setelah tahun 2014.

Di sisi lain, Provinsi Aceh memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah, yaitu 4,12%, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 7,7% dan kontraksi paling signifikan pada tahun 2020 sebesar -0,74%. Secara keseluruhan, pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak negatif pada seluruh provinsi, dengan kontraksi ekonomi yang cukup signifikan. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, semua provinsi mulai menunjukkan pemulihan dengan tren pertumbuhan yang kembali positif.

5.2 Penentuan Model Estimasi

5.2.1 Uji Chow

Uji chow digunakan untuk mengetahui model panel apa yang cocok untuk digunakan antara Pooled Least Square dan Fixed Effect Model, maka perlu dilakukan uji Ftest. Hipotesis Uji Chow adalah:

H0 : Common effect model (Pooled OLS)

H1 : Fixed effect model (LSDV)

Untuk nilai statistic F hitung apabila nilai probabilitas F-statistic lebih kecil dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model, sedangkan apabila nilai probabilitas F-probabilitas F-statistik lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0.05) maka model yang digunakan adalah Pooled Least Square (PLS) / Common Effect (CE). Berikut hasil uji Chow:

Tabel 5.35
Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.357058	(9,175)	0.0000
Cross-section Chi-square	38.011218	9	0.0000

Sumber : *Data Diolah Eviews 10*

Berdasarkan hasil diatas menunjukkan bahwa probabilitas F-statistic sebesar 0.0000 kurang dari 0,05 ($0.0000 < 0,05$), artinya H0 ditolak. Model yang terpilih menurut uji chow adalah Fixed Effect Model.

5.2.2 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk membandingkan model panel yang paling cocok digunakan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Hipotesis Uji Hausman adalah:

H0 : Random Effect Model

H1 : Fixed effect model (LSDV)

Untuk statistiknya uji hausman mengikuti distribusi statistic chi-square di mana apabila nilai probabilitas chiSquare statistic lebih kecil dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah Fixed Effect Model, namun apabila nilai probabilitas chi-Square statistic lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model panel yang digunakan adalah Random Effect Model. Berikut hasil uji Hausman:

Tabel 5.36
Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.292730	3	0.9614

Sumber : *Data Diolah Eviews 10*

Dari hasil uji hausman pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas chiSquare statistic sebesar 0,9614 lebih dari 0,05 ($0,9614 > 0,05$) yang berarti H0 diterima. Dari hasil uji hausman pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan dalam uji data panel ini adalah Random Effect Model.

Jadi dari hasil uji Chow dan uji Hausman yang telah dilakukan maka pada penelitian ini regresi data panel yang digunakan adalah **Random Effect Model**.

5.2.3 Uji Lagrange Multiper (LM)

Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect (OLS) digunakan uji Lagrange Multiper (LM).

H0 : Common effect model (Pooled OLS)

H1 : Random Effect Model

Untuk statistiknya uji Lagrange Multiper (LM) mengikuti distribusi statistic chi-aquare di mana apabila nilai probabilitas chiSquare statistic lebih kecil dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model yang digunakan adalah Random Effect Model, namun apabila nilai probabilitas chi-Square statistic lebih besar dari tingkat signifikan 5% (0,05) maka model panel yang digunakan adalah Random Effect Model.

Tabel 5.37
Uji Lagrange Multiper (LM)

	Cross-section	Test Hypothesis Time	Both
Breusch-Pagan	31.87110 (0.0000)	96.65304 (0.0000)	128.5241 (0.0000)

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Dari hasil uji Lagrange Multiper pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai probabilitas chiSquare statistic (Breusch-Pagan) sebesar 0,0000 lebih dari 0,05 ($0,0000 < 0,05$) yang berarti H1 diterima. Dari hasil uji Lagrange Multiper pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan dalam uji data panel ini adalah Random Effect Model.

Jadi dari hasil uji Chow, uji Hausman dan uji Lagrange Multiper yang telah dilakukan maka pada penelitian ini regresi data panel yang digunakan adalah **Random Effect Model**.

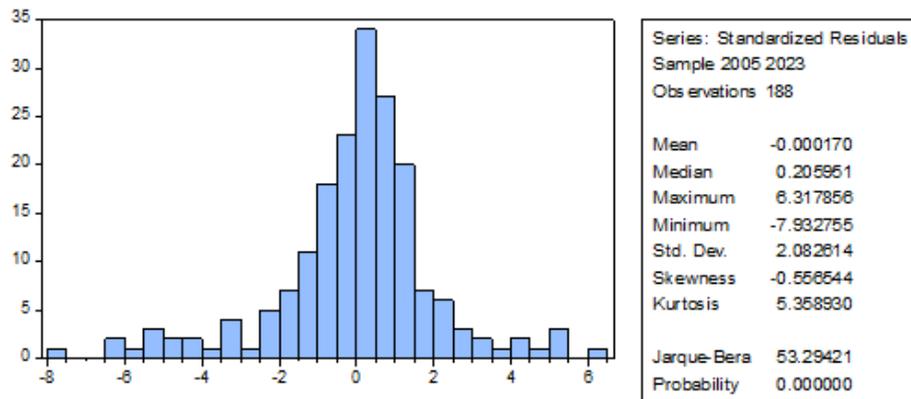
5.3 Uji Asumsi Klasik

5.3.1 Uji Normalitas

Untuk menguji apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk menguji normalitas data menggunakan eviews ada dua cara, yaitu dengan menggunakan histogram dan uji Jarque-bera. Jarque-bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Menurut Gujarati (2013) deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary

Least Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut:

- a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal
- b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal



Grafik 5.1 Uji Normalitas

Dari grafik diatas dapat dilihat nilai Jarque-bera sebesar 53.29421 dengan nilai probability 0,000000. Maka dapat disimpulkan model pada penelitian ini tidak terdistribusi normal, karena nilai probability 0,000000 lebih kecil dari 0,05.

5.3.2 Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas artinya antara variabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan yang mendekati sempurna (Koefisien tinggi atau $= 1$). Adanya multikolinearitas akan menyebabkan ketidakpastian estimasi, sehingga mengarah kesimpulan yang menerima hipotesis nol. Menurut Widarjono (2013:104), jika koefisien korelasi antar variabel independen diatas 0.85 maka diduga ada multikolinieritas dalam model. Sebaliknya, bila koefisien korelasi antar variabel independen dibawah 0,85 maka tidak terdapat gejala multikolinieritas dalam model.

Berikut tabel hasil uji Multikolinearitas:

Tabel 5.38
Uji Multikolinearitas

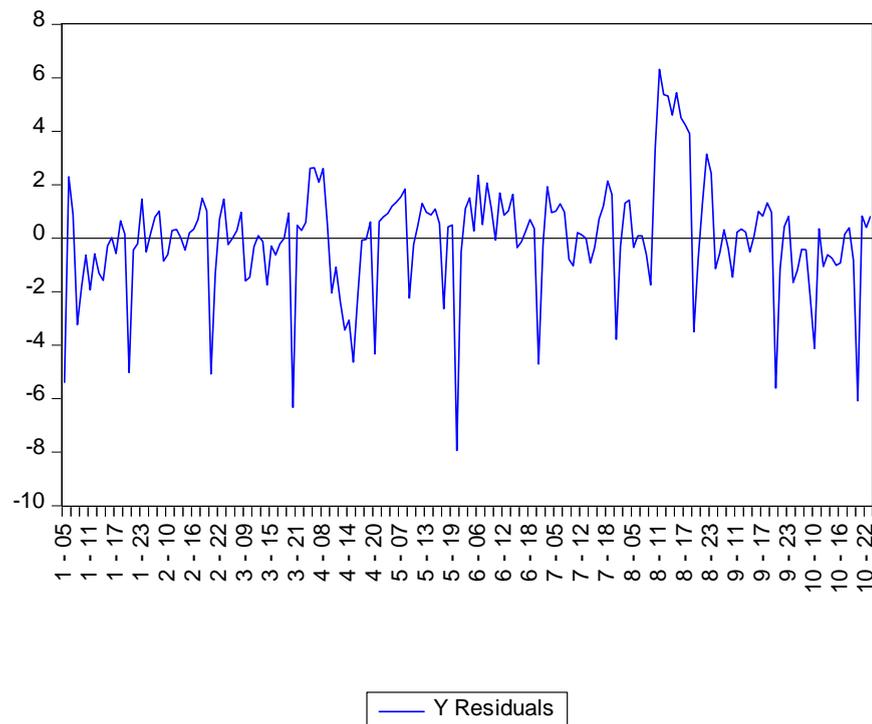
Variabel	X1	X2	X3
X1	1.000000	0.085293	-0.489207
X2	0.085293	1.000000	0.345063
X3	-0.489207	0.345063	1.000000

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Berdasarkan tabel hasil uji Multikolinearitas diatas dapat diketahui bahwa dari masing-masing variabel Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar yakni senilai 0,085293, variabel Tingkat Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia senilai -0,489207 dan Nilai Tukar dan Indeks Pembangunan Manusia senilai 0,345063. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada Multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

5.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah residu beberapa data dalam suatu model regresi mempunyai varian yang konstan, dilakukan uji heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas terjadi apabila varians residu berfluktuasi dari satu pengamatan ke pengamatan berikutnya, sedangkan homoskedastisitas menggambarkan keadaan dimana varians residu bersifat konstan. Model regresi yang efektif ditandai dengan homoskedastisitas, artinya tidak menunjukkan heteroskedastisitas (Ghozali, Imam, 2011). Berikut hasil dari Heteroskedastisitas.



Grafik 5.2 Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik residual diatas dapat dilihat tidak melewati batas (500 dan -500), artinya varian residual sama. Oleh sebab itu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos dari uji heteroskedastisitas (Napitupulu, *et.al.*, 2021).

5.3.4 Uji Autokorelasi

Untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya ($t-1$). Jika ada korelasinya, maka dikatakan telah terjadi suatu autokorelasi. Suatu model yang baik seharusnya tidak terdapat autokorelasi. Masalah autokorelasi ini seringkali dialami oleh data time series. Uji autokorelasi pada penelitian kali ini menggunakan uji Durbin Watson. Jika hasil nilai Durbin Watson berada diantara d_U dan $4-d_U$, maka dikatakan dalam data tidak terjadi autokorelasi. Berikut adalah hasil uji autokorelasi model pertama :

Tabel 5.39
Uji Autokorelasi Durbin Watsons

R-squared	0.199239	Mean dependent var	5.140904
Sum squared resid	811.0714	Durbin-Watson stat	1.285358

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Untuk nilai dU dan dL diperoleh dari Durbin Watson. Oleh karena itu, penelitian menggunakan jumlah sampel 140 ($n=140$) dan jumlah variabel bebas sebanyak 3 ($k=3$), maka nilai dL tabel adalah sebesar 1,6804 dan dU tabel sebesar 1,7678 dan berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai DW (Durbin-Watson) sebesar 1.285358. Karena nilai $DW < dL$ ($1,2853 < 1,6804$) maka dapat dikatakan untuk model ini mengindikasikan autokorelasi.

5.4 Analisis Regresi Data Panel Dengan REM

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang dilakukan untuk membangun persamaan yang menghubungkan antara Y (variabel dependen) dengan X (variabel independen) yang bertujuan untuk menentukan nilai ramalan atau dugaan, dimana perubahan X mempengaruhi Y tetapi tidak sebaliknya. Persamaan yang menyatakan bentuk hubungan antara variabel X dan variabel Y disebut dengan persamaan regresi. Adapun hasil dari Regresi Linear Berganda pada tabel berikut:

Tabel 5.39
Regresi Data Panel Dengan REM

Variabel	Coefficient	Std. Error
C	7.129875	6.374101
X1	0.161564	0.067971
X2	-0.441906	0.074310
X3	0.000393	0.000945

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Berdasarkan tabel diatas hasil analisis regresi linear berganda dengan data panel pada tabel dapat diperoleh koefisien variabel bebas $X1 = 0,161564$ $X2 = -0,441906$ dan $X3 = 0,000393$ dengan konstanta sebesar 7,129875 sehingga model regresi linear berganda dengan data panel yang diperoleh:

$$Y = 7,129875 + 0,161564 - 0,441906 + 0,441906$$

Dari persamaan regresi data panel tersebut dapat diinterpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 7,129875 memberikan arti bahwa apabila variabel independent yaitu Tingkat Inflasi, Nilai Tukar dan Indeks Pembangunan Manusia bernilai (0), maka variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi akan bernilai 7,129875.
2. Koefesien regresi Tingkat Inflasi (X1) bernilai positif sebesar 0,161564 artinya apabila Tingkat Inflasi mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,161564.
3. Koefesien regresi Nilai Tukar (X2) bernilai negatif sebesar -0,441906 artinya apabila Nilai Tukar mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar - 0,441906.
4. Koefesien regresi Indeks Pembangunan Manusia (X3) bernilai positif sebesar 0,000393 artinya apabila Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan sebesar 1 (satu) satuan sedangkan variabel lainnya dianggap konstan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan mengalami peningkatan sebesar 0,000393.

5.5 Uji Hipotesis

Untuk mengetahui apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, dilakukan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$.

5.5.1 Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali dan Imam (2011), pengujian ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar suatu variabel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Uji t dirancang untuk menguji koefisien regresi secara independen. Adapun hasil uji t pada tabel berikut ini:

Tabel 5.40
Uji t

Variable	t-Statistic	Prob.
C	1.118569	0.2648
X1	2.376959	0.0185
X2	5.946809	0.0000
X3	0.415624	0.6782

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Berdasarkan tabel diatas hasil pengujian secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, hasil perbandingan antara thitung dan ttabel pada Tingkat Inflasi menunjukkan thitung sebesar 2.376959 sedangkan ttabel sebesar 1,97280. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung > ttabel yaitu $2.376959 > 1,97280$ dan bila dilihat pada taraf signifikansi yakni $0,0185 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2005-2023.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Roudlotul Ma'wa dan Iwan Fahri Cahyadi (2023) yang mengatakan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian Novita Octavia, Isnaini Harahap dan Muhammad Ikhsan Harahap (2023) juga menyebutkan bahwa inflasi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena terkait erat dengan daya beli masyarakat, stabilitas harga, dan iklim investasi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, karena kenaikan harga barang dan jasa sering kali lebih cepat daripada peningkatan pendapatan. Kondisi ini mengakibatkan konsumsi menurun, padahal konsumsi merupakan komponen utama dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, inflasi yang tinggi juga berdampak pada biaya produksi yang harus ditanggung perusahaan, seperti biaya

bahan baku, tenaga kerja, dan energi. Kenaikan biaya ini dapat mengurangi margin keuntungan dan membuat iklim investasi kurang menarik bagi para investor, yang sering kali lebih memilih menanam modal di negara-negara dengan inflasi yang lebih stabil demi meminimalkan risiko.

Untuk menahan laju inflasi, bank sentral cenderung menaikkan suku bunga. Sayangnya, suku bunga yang tinggi membuat pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga konsumsi dan investasi dapat tertahan karena perusahaan dan individu lebih enggan untuk berutang. Di sisi lain, inflasi yang tidak terkendali juga menimbulkan ketidakpastian ekonomi, yang membuat pelaku bisnis dan investor kesulitan merencanakan pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Ketidakpastian ini sering menurunkan tingkat investasi dan ekspansi usaha yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Inflasi yang tinggi juga memengaruhi ekspor, karena barang lokal menjadi lebih mahal di pasar internasional sehingga daya saing ekspor menurun dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, inflasi yang tidak terkendali dapat memperburuk ketimpangan ekonomi, di mana masyarakat dengan pendapatan tetap akan lebih merasakan dampaknya dibandingkan mereka yang memiliki pendapatan fleksibel. Ketimpangan ini dapat memicu ketidakstabilan sosial yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, inflasi yang stabil dan terkendali penting bagi terciptanya iklim ekonomi yang sehat, mendukung investasi, konsumsi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

2. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, hasil perbandingan antara thitung dan ttabel pada Nilai Tukar menunjukkan thitung sebesar 5.946809 sedangkan ttabel sebesar 1,97280. Dari hasil tersebut terlihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $5.946809 > 1,97280$ dan bila dilihat pada taraf signifikansi yakni $0,0000 < 0,05$. Maka dapat

disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Nilai Tukar berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2005-2023.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2024) yang mengatakan bahwa nilai tukar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar merupakan faktor penting dalam perdagangan global. Nilai tukar yang kuat dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global dengan mengurangi biaya ekspor dan meningkatkan biaya impor. Sebaliknya, nilai tukar yang lemah dapat menguntungkan impor namun merugikan ekspor, yang dapat mengganggu keseimbangan perdagangan suatu negara. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat terkait nilai tukar dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui perubahan dalam volume perdagangan dan daya saing produk domestik.

Nilai tukar tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di negara yang memiliki basis konsumsi domestik kuat dan ketergantungan rendah pada perdagangan internasional. Dengan konsumsi dan produksi dalam negeri yang dominan, fluktuasi nilai tukar tidak terlalu berdampak pada aktivitas ekonomi. Selain itu, cadangan devisa yang memadai dan kebijakan moneter yang stabil dapat menjaga kestabilan ekonomi meski nilai tukar berfluktuasi. Bagi negara dengan sistem nilai tukar tetap, perubahan kurs juga memiliki pengaruh minimal. Di tingkat perusahaan, strategi lindung nilai (*hedging*) membantu memitigasi risiko kurs sehingga dampak nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kecil.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada model regresi, hasil perbandingan antara t_{hitung} dan t_{tabel} pada Indeks Pembangunan

Manusia menunjukkan thitung sebesar 0,415624 sedangkan ttabel sebesar 1,97280. Dari hasil tersebut terlihat bahwa thitung < ttabel yaitu $0,415624 < 1,97280$ dan bila dilihat pada taraf signifikansi yakni $0,6782 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Indeks Pembangunan Manusia tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2005-2023.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Dkk. (2023) dan Nurul Azmi Fauziah (2024) yang mengatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu tolak ukur pembangunan suatu wilayah yang berkorelasi negatif terhadap kondisi kemiskinan di wilayah tersebut, karena diharapkan suatu daerah yang memiliki nilai IPM tinggi, idealnya kualitas hidup masyarakat yang tinggi atau dapat dikatakan pula bahwa jika nilai IPM tinggi maka seharusnya kemiskinan rendah. Kualitas sumberdaya manusia juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup/Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak selalu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi karena peningkatan kualitas hidup dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup membutuhkan waktu sebelum hasilnya terlihat. Meski IPM naik, hal ini tidak otomatis meningkatkan sektor produktif, terutama jika sumber daya manusia kurang dimanfaatkan optimal atau lapangan kerja terbatas. Selain itu, tanpa dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai, peningkatan kualitas manusia dari IPM mungkin tidak berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi.

5.5.2 Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama atau simultan. Tes ini mengevaluasi

kemanjuran dan kesesuaian model regresi yang digunakan dalam penelitian. Berikut tabel dari hasil uji F:

Tabel 5.41
Uji F

F-statistic	17.92152
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Hasil perhitungan menggunakan program Eviews dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dapat diketahui bahwa Fhitung sebesar dengan membandingkan Ftabel $\alpha = 0,05$ dengan derajat pembilang (banyaknya X) = 3 (tiga) dan derajat penyebutnya $(n-k-1) = 136$ didapat Ftabel sebesar 2,65. Fhitung lebih besar dari Ftabel ($17,92152 > 2,65$) dan taraf signifikannya yakni ($0,00 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent secara bersama-sama terhadap variabel dependent. Yang artinya dapat dikatakan bahwa secara simultan Tingkat Inflasi, Nilai Tukar dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2005-2023.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Asnidar (2018) yang menyebutkan bahwa IPM dan tingkat inflasi mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan menurut Roudlotul dan Fahri (2023) juga menyebutkan hal demikian bahwa tingkat inflasi, nilai tukar dan IPM berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Tingkat inflasi, nilai tukar, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketiganya mencerminkan kondisi fundamental ekonomi yang saling terkait. Inflasi yang terkendali menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga, yang penting untuk mendorong konsumsi domestik, salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, nilai tukar yang stabil mendukung daya saing ekspor dan menjaga biaya impor tetap terjangkau, yang bermanfaat bagi sektor-sektor produktif yang bergantung pada bahan baku impor.

IPM yang meningkat mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang esensial bagi produktivitas dan inovasi. Kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih baik membuat tenaga kerja lebih produktif dan berdaya saing, meningkatkan kapasitas ekonomi nasional. Kombinasi dari inflasi terkendali, nilai tukar stabil, dan IPM yang tinggi memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, daya saing internasional, dan peningkatan produktivitas. Ketiganya, saat berjalan beriringan, menciptakan sinergi yang mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan seberapa baik model memperhitungkan variasi variabel terikat. Dalam penilaian ini, nilai R^2 dan Adjusted R^2 digunakan. Penggunaan R^2 mempunyai kekurangan yang melekat, oleh karena itu banyak peneliti mengusulkan untuk menggunakan nilai Adjusted R^2 . Salah satu kelemahannya adalah R^2 mungkin dipengaruhi oleh jumlah variabel independen dalam model. R^2 akan naik terlepas apakah variabel terikat dipengaruhi secara signifikan atau tidak oleh penambahan variabel bebas. Menurut Ghazali dan Imam (2011). Menurut Ghazali, Imam (2011), rentang nilai Adjusted R^2 berkisar antara nol hingga satu. Mayoritas variabel independen model mungkin cukup menjelaskan informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen jika Adjusted R^2 mendekati 1. Adapun hasil dari uji koefisien determinasi yakni sebagai berikut:

Tabel 5.42
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.226125
Adjusted R-squared	0.213508
S.E. of regression	1.930353

Sumber : Data Diolah Eviews 10

Dari hasil pengujian koefisien determinasi pada tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar 0,22615 yang artinya bahwa

besarnya kontribusi variabel independent yakni Tingkat Inflasi, Nilai Tukar dan Indeks Pembangunan Manusia mempengaruhi variabel dependent yakni Pertumbuhan Ekonomi sebesar $(0,22615 \times 100 = 22,61\%)$, sedangkan sisanya $(100\% - 22,61\% = 77,39\%)$ dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini. Semakin kecil nilai R Square maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent semakin melemah begitu juga sebaliknya, jika R Square mendekati 1 maka pengaruh tersebut akan semakin kuat.